

Penanganan Anak Jalanan: Meretas Indikator Keberhasilan

“Every child has a right to grow up in a nurturing environment where they can realise their full potential. The street, with the risks it poses, is not such an environment. Often objects of pity and fear, street children are boys and girls using street as their source of livelihood or home.”

Plan International (2007:1)

Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Menangani anak jalanan tidaklah sederhana. Oleh sebab itu, penanganannya pun tidak dapat disederhanakan. Strategi intervensi maupun indikator keberhasilan penanganan anak jalanan dilakukan secara holistik mengacu kepada visi atau *grand design* pembangunan kesejahteraan dengan memperhatikan karakteristik anak jalanan, fungsi dan model penanganan yang diterapkan.

Karakteristik anak jalanan

Anak jalanan adalah anak laki-laki dan perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, seperti pasar, *mall*, terminal bis, stasiun Kreta Api, taman kota. Mengapa mereka tidak boleh hidup di jalanan? Karena jalanan bukanlah tempat yang pantas bagi mereka. Mereka seharusnya hidup bersama orang tua dan saudara-saudaranya di rumah yang hangat dan bersahabat. Mereka juga selayaknya bermain dan belajar di sekolah atau di tempat-tempat yang memang pantas untuk itu. Jalanan, seperti pernyataan *Plan International* di atas, memiliki resiko-resiko yang sangat berbahaya bagi anak. Jalanan bukanlah lingkungan yang baik untuk proses tumbuh-kembang anak dan merealisasikan potensinya secara penuh.

Anak jalanan adalah fenomena sosial yang hingga saat ini terus mencemaskan dunia. Meskipun anak jalanan ditemukan di beberapa negara maju, mereka lebih banyak berada di jalanan kota-kota negara berkembang, mulai dari Bombay, Dhaka, Lima, Meksiko hingga Jakarta. Secara global, diperkirakan ada sekitar 100 juta anak jalanan di seantero dunia. Sebagian besar anak jalanan adalah remaja berusia belasan tahun. Tetapi tidak sedikit yang berusia di bawah 10 tahun. Anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal, seperti menyemir sepatu, menjual koran, mencuci kendaraan, menjadi pemulung barang-barang bekas. Sebagian lagi mengemis, mengamen, dan bahkan ada yang mencuri, mencopet atau terlibat perdagangan sex.

Kepedulian terhadap anak jalanan terutama didasari kenyataan bahwa anak adalah aset bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sementara itu, hidup di jalanan sangat membahayakan anak. Mereka kerap mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang dewasa – termasuk orang

tuanya; mereka rentan terhadap kekerasan fisik, sosial dan seksual; mereka juga sering terpaksa harus menjadi pengguna dan pengedar Narkoba atau terlibat kejahatan (lihat Kotak 17.1).

Kotak 17.1: Kekerasan terhadap Anak Jalanan: Kasus Yogyakarta

Evo (7), bukan nama sebenarnya, hampir setiap hari dalam masa liburan sekolah lalu, turun ke jalan. Berangkat dari rumah di sekitar ledok Kali Code, Gowongan, pukul delapan, bahkan kurang, dan pulang sore hari. Bersama saudara-saudaranya ia mengumpulkan rupiah demi rupiah di perempatan lampu merah. Ibunya mengawal dan mengawasi sambil menjual koran. Setiap beberapa menit ia serahkan uang yang diperoleh pada ibunya itu. Ada target yang harus dipenuhi agar ia tidak mendapat dera ibunya. Tanpa alas kaki, ia masuk di sela kendaraan yang sedang menunggu lampu hijau menyala. Kulitnya yang tidak tertutup pakaian sudah menghitam karena panas matahari. Begitu pula rambutnya yang kemerah-merahan.

Di jalan rata-rata mereka memiliki pengalaman buruk dengan Polisi Pamong Praja. Penanganan yang dilakukan pemerintah lebih sering bersifat sementara dan dengan tindak kekerasan yang menimbulkan trauma. Kehidupan anak jalanan di lingkungan masyarakat tidak jauh dari berbagai macam kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam keluarga miskin yang banyak di Indonesia. Ironisnya, kekerasan terhadap mereka sering dilakukan oleh orang yang dekat seperti orangtua anak. Hak anak untuk

hidup dalam keceriaan dilanggar setiap hari oleh orangtua sendiri.

Itu hanya sebagian kecil dari kenyataan yang dialami Evo, juga anak-anak lain di Kota Yogyakarta. Belum lagi anak-anak di kota-kota lain seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, dan lain-lain. Struktur kota yang secara demografis padat penduduk sibuk dengan lalu lalang kendaraan dan cepatnya laju perubahan ekonomi memberikan banyak tekanan pada keluarga-keluarga miskin. Catatan kekerasan terhadap anak dari Komisi Nasional Perlindungan Anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai akhir Juni 2006 saja terdapat 415 kasus yang dilaporkan.

Undang-undang tentang perlindungan anak belum mampu menurunkan angka kekerasan tersebut, bahkan semakin menunjukkan banyaknya kekerasan yang dialami anak. Anak-anak yang dieksploitasi, dipekerjakan dalam lingkungan yang buruk, dan berbagai bentuk diskriminasi masih sangat sering dijumpai terutama di kota-kota besar dan dalam keluarga miskin. Yang lebih berbahaya adalah menganggap hal-hal seperti itu sebagai sesuatu yang biasa. Karena miskin, misalnya, maka anak dipaksa mengemis di jalanan.

Sumber: Muhammad Taufik Basari, "Anak Jalanan dalam Lingkar Kekerasan," *KOMPAS*, 29 Agustus 2006

Pada umumnya anak jalanan tidak hidup bersama keluarganya, tidak bersekolah, dan tidak memiliki orang dewasa atau lembaga yang merawat mereka. Kemiskinan diyakini sebagai faktor utama menimbulkan fenomena anak jalanan. Keluarga yang miskin cenderung menyuruh anak mereka bekerja. Selain itu, tidak sedikit anak-anak yang menjadi anak jalanan karena keluarga tidak harmonis, ditelantarkan oleh keluarganya, atau karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Model penanganan

Fokus utama (*core business*) pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial (*social protection*). Oleh karena itu, model pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan.

Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial, maka kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan *right-based initiatives*, yakni memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar anak sesuai dengan aspirasi terbaik mereka (*the best interest of the children*) (Suharto, 2006; 2007). Strategi intervensi pekerjaan sosial tidak bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan (lihat Kotak 2).

Dalam garis besar, alternatif model penanganan anak jalanan mengarah kepada 4 jenis model, yaitu: ¹

1. *Street-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di “jalan” dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan.
2. *Family-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya.
3. *Institutional-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara (*drop in*), “Rumah Singgah” atau “open house” yang menyediakan fasilitas “panti dan asrama adaptasi” bagi anak jalanan.
4. *Community-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program *community development* untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup *Corporate Social Responsibility* (tanggungjawab sosial perusahaan).

¹] Pembagian ini tidak bersifat kaku. Sebagai contoh, Rumah Singgah bisa pula dikategorikan sebagai semi-institusional karena sistem ini memadukan unsur ‘kelembagaan’ dan ‘jalanan’. Sebagian besar Rumah Singgah berlokasi tidak jauh dari jalanan dimana anak jalanan biasa beroperasi.

Kotak 2: Penanganan Anak Jalanan di SEMARANG: Pemberian Bantuan Modal Saja Tidak Cukup

Upaya Pemerintah Kota Semarang mengentaskan anak-anak jalanan dari kehidupan di jalanan dengan cara memberikan bantuan modal kepada orangtua anak jalanan dinilai tidak cukup. Pemberian bantuan modal ini tidak dapat serta merta mengentaskan keluarga anak jalanan dari kemiskinan. “Saya setuju pembinaan anak jalanan dimulai dari orangtua mereka. Namun, jangan sampai Pemkot hanya memberikan modal kepada mereka tanpa pendampingan yang berkelanjutan,” kata Koordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak Jawa Tengah Agnes Widanti.

Beberapa waktu lalu, Pemkot memberikan bantuan modal kepada orangtua anak jalanan warga Gunung Brintik, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan sebesar Rp 750.000 per orang. Pemkot berharap uang tersebut digunakan untuk modal usaha agar orangtua anak jalanan dapat keluar dari masalah kemiskinan. Agnes membenarkan, akar dari keberadaan anak jalanan adalah kemiskinan. Namun, mengentaskan mereka dari jalanan bukan suatu pekerjaan yang mudah karena dibutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen pemerintah. Untuk itu,

kata Agnes, Pemkot harus benar-benar serius mengatasi anak jalanan. Jika Pemkot tidak mampu membina anak jalanan sendiri, Pemkot bisa menyerahkan dana pembinaan anak jalanan yang dianggarkan dalam APBD 2007 sebesar Rp 1 miliar ke lembaga swadaya masyarakat yang lebih tahu mengurus dan membina anak-anak jalanan.

Data yang dihimpun sejumlah LSM dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Semarang tahun 2006 ada 898 anak jalanan yang dibina empat RPSA dan dua LSM. Dari jumlah itu, sebanyak 747 anak jalanan masih mempunyai orangtua. Dari 898 anak jalanan, sebanyak 500 anak masih aktif di jalan, 331 anak terkadang turun ke jalan, dan 39 anak tak lagi turun ke jalan. Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Semarang Mustohar menyadari, pengentasan anak-anak jalanan dari kehidupan di jalanan tidak mudah. Hal ini karena jalanan memberikan rezeki yang cukup dan bisa diandalkan. Untuk itu, Pemkot bekerja sama dengan sejumlah LSM dan RPSA akan membangun kesadaran orangtua anak-anak jalanan untuk mencegah anak-anak mereka turun ke jalan.

Sumber: KOMPAS, 12 April 2007

Indikator keberhasilan

Indikator dapat didefinisikan sebagai suatu alat ukur untuk menunjukkan atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Indikator dapat menyangkut suatu fenomena sosial, ekonomi, penelitian, proses suatu usaha peningkatan kualitas. Menurut Carlisles, indikator sosial pada dasarnya menunjuk pada definisi operasional atau bagian dari definisi operasional dari suatu konsep utama yang memberikan gambaran tentang suatu sistem sosial. Indikator dapat berbentuk ukuran, angka, atribut atau pendapat yang dapat menunjukkan kemungkinan perubahan. Indikator digunakan apabila aspek yang akan dinilai perubahannya tidak dapat secara langsung dilihat seperti halnya tinggi badan, berat badan atau harga suatu barang yang secara kuantitatif mudah diukur (Suharto, 1997).

Indikator keberhasilan penanganan anak jalanan mencakup variabel-variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan sebuah proses atau hasil dari intervensi yang dilakukan terhadap anak jalanan dan sistem lingkungan yang terkait dengannya. Prinsip-prinsip indikator keberhasilan penanganan anak jalanan:

1. Sebaiknya sedikit, namun sensitif. Artinya, indikator tersebut tidak terlalu banyak dan kompleks. Melainkan, berupa indikator-indikator kunci, namun memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu secara tepat dan akurat (*valid and reliable*).
2. Variabel-variabel yang dikembangkan hendaknya menggambarkan variabel masukan (*input*) (misalnya: fasilitas panti, pendidikan pekerja sosial), proses pelayanan/kegiatan (misalnya bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial) dan hasil yang ingin dicapai dari proses tersebut.
3. Data atau informasi mengenai variabel-variabel yang diukur mudah diperoleh. Usahakan informasi yang dikumpulkan berupa informasi yang sulit direayasa atau dimanipulasi oleh informan. Misalnya, data mengenai variabel masukan panti bisa adalah rasio pekerja sosial dan klien. Selain tidak sulit, informasi mengenai jumlah pekerja sosial dan klien mudah diverifikasi atau dibuktikan.
4. Sejalan dengan model penanganan, apakah *street-centered intervention*, *family-centered intervention*, *institutional-centered intervention* atau *community-centered intervention*, serta fungsi dan fokus pelayanan dari masing-masing model tersebut (misalnya pencegahan, penyembuhan, pengembangan).
5. Pada tingkat provinsi, indikator keberhasilan penanganan anak jalanan bisa dirumuskan berdasarkan konteks wilayah kabupaten/kota, namun tetap mengacu pada visi atau tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial provinsi secara terintegrasi.

Rekomendasi

Indikator keberhasilan sangat penting dalam menentukan posisi dan arah kebijakan dan program. Karena dapat memberikan informasi mengenai proses dan hasil suatu kegiatan. Rumusan indikator keberhasilan penanganan anak jalanan harus mencakup aspek dan variabel-variabel yang terukur secara operasional mengenai proses penanganan anak jalanan dan hasil yang diharapkan dari proses tersebut.

Namun demikian, perumusan indikator tersebut hendaknya dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan *grand design* pembangunan kesejahteraan sosial, termasuk landasan konseptual, visi dan misi pembangunan kesejahteraan sosial di suatu wilayah. Sebagai contoh, jika dibuat untuk wilayah Jawa Barat, maka indikator keberhasilan harus merujuk ke *grand design* pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Jawa Barat. Selain itu, meskipun penyusunannya bisa saja langsung dimulai dengan pemuatan matriks indikator keberhasilan mengenai salah satu penanganan PMKS (misalnya anak jalanan dan Pengemis Gelandangan dan Orang Telantar), hasil akhirnya harus berwujud naskah yang komprehensif tentang, misalnya, “INDIKATOR MENUJU JAWA BARAT SEJAHTERA”.

Sebagai contoh, naskah tentang Menuju Jawa Barat Sejahtera sedikitnya mencakup 4 bab:

1. **Pendahuluan.** Memuat latar belakang mengapa Indikator Jawa Barat Sejahtera perlu dirumuskan, apa tujuannya, apa manfaat/kegunaannya; dan pendekatan/metodologi yang diterapkan.
2. **Landasan konseptual pembangunan kesejahteraan sosial dan indikator sosial.** Memuat konsep-konsep dan variabel-variabel yang terkait dengan:
 - a. Pembangunan kesejahteraan sosial, seperti definisi pembangunan kesejahteraan sosial, fokus utama atau *core business*-nya, visi & misi pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Barat, pendekatan atau metoda, kelompok sasaran (jenis-jenis PMKS), dan model dan bentuk-bentuk pelayanan sosial;
 - b. Indikator sosial, seperti definisi indikator sosial, klasifikasi indikator sosial, teknik-teknik pengukuran indikator sosial;
3. **Indikator Jawa Barat Sejahtera.** Memuat rumusan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial yang bisa diterapkan pada konteks kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Alasannya, indikator keberhasilan pada tingkat provinsi merupakan agregat dari keberhasilan pada tingkat kabupaten/kota. Bisa disajikan dalam bentuk deskripsi dan matriks mengenai dimensi dan aspek-aspek indikator sosial berdasarkan kelompok sasaran, program utama, aspek-aspek yang diukur, informasi yang diperlukan dan indikator keberhasilan (kriteria penilaian).
4. **Penutup**

Lihat “Matriks Indikator Jawa Barat Sejahtera” yang memuat beberapa hal mengenai indikator keberhasilan. Meskipun matriks ini belum selesai dan hanya memuat beberapa hal yang dianggap perlu diketahui dalam menyusun indikator keberhasilan, matriks ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan indikator yang lebih lengkap. Data mengenai indikator keberhasilan pada kolom matriks terakhir, misalnya, menunjuk pada kriteria penilaian yang menyangkut tinggi-rendahnya keberhasilan. Kriteria dalam prosentase dan rasio hanyalah contoh saja.

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL JAWA BARAT

Memperkokoh pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial yang berwawasan perlindungan sosial. Tujuan: meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan terjangkau, khususnya bagi kelompok kurang beruntung (PMKS).

MATRIKS: MENUJU JAWA BARAT SEJAHTERA

Kelompok Sasaran (PMKS)	Program Utama	Aspek	Informasi yang diperlukan	Indikator Keberhasilan
1. ANAK Jalanan	Bantuan sosial. Program/kegiatan Bansos yang bersifat: ▪ Pencegahan (jika ada, sebutkan namanya) ▪ Rehabilitatif (jika ada, sebutkan namanya) ▪ Pengembangan (jika ada, sebutkan namanya)	▪ Derajat kesejahteraan anjal ▪ Perilaku adekuat anjal ▪ Keluarga adekuat ▪ Lingkungan adekuat (sehat, bersahabat, responsif) ▪ Bantuan sosial yang bermutu dan terjangkau	▪ Prosentase anjal di kabupaten/kota yang memperoleh beasiswa untuk sekolah ▪ Prosentase keluarga anjal di kabupaten/kota yang memperoleh tunjangan uang untuk pemenuhan kebutuhan dasar ▪ Prosentase anjal yang tidak melakukan tindak kriminal	▪ Tinggi: antara 70 sd 100 persen ▪ Sedang: antara 50 sd 70 persen ▪ Rendah: di bawah 50 persen
	Asuransi kesejahteraan sosial	▪ Derajat kepesertaan Askesos	▪ Prosentase keluarga anjal yang menjadi peserta Askesos	
	Rehabilitasi sosial		▪ Rasio antara lembaga pelayananan sosial untuk anjal (panti, Rumah Singgah) terhadap jumlah anjal di kabupaten/kota	▪ Tinggi: rasio 1: 1.000 Anjal ▪ Sedang: rasio 1: 1.000 sd 2.000 ▪ Rendah:: rasio 1: lebh dari 2000
	Pemberdayaan sosial		▪ Prosentase anjal yang memiliki keterampilan UEP	
2. Pengemis, Gelandangan dan Orang Telantar (PGOT)	Bantuan sosial			
	Asuransi sosial			
	Rehabilitasi sosial			
	Pemberdayaan sosial			
3. WTS	Bantuan sosial			
	Asuransi sosial			
	dst			